



Strategi Transformasi Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok: Rencana Lima Tahun ke Depan

Defni Albar

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Syafwandi

Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang

Alamat: Jl. Raya Lubuk Begalung, Lubuk Begalung Nan XX, Kec. Lubuk Begalung, Kota
Padang

defnialbar18@gmail.com, wandi.syaf@yahoo.com

Abstrak. Digital transformation is a strategic step to improve the quality of public services, bureaucratic efficiency, and transparency in government administration. The Solok Regency Communication and Information Agency considers it necessary to have a five-year medium-term strategy to guide the development of technological infrastructure, information systems, and human resource capacity building. This study aims to formulate a targeted, measurable digital transformation strategy that is in line with the local government's vision. The methods used include needs analysis, evaluation of existing conditions, interviews with stakeholders, and comparative studies of best practices in other regions. The study results indicate the need to strengthen infrastructure networks, integrate electronic-based service systems, develop regional data centers, improve public digital literacy, and strengthen regulations and information security governance. The resulting strategy is expected to serve as a roadmap for the implementation of digital transformation in Solok Regency, which is adaptive to technological developments and capable of addressing the challenges of the digital era. With the implementation of this strategy, Diskominfo is expected to realize fast, accurate, and transparent public services, as well as increase community participation in the use of information technology.

Keywords: Digital Transformation, Strategy, Public Services, Governance

Abstrak. Transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi tata kelola pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok memandang perlu adanya strategi jangka menengah lima tahun ke depan guna mengarahkan pengembangan infrastruktur teknologi, sistem informasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Kajian ini bertujuan merumuskan strategi transformasi digital yang terarah, terukur, dan selaras dengan visi pemerintah daerah. Metode yang digunakan meliputi analisis kebutuhan, evaluasi kondisi eksisting, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta studi perbandingan terhadap praktik terbaik di daerah lain. Hasil kajian menunjukkan perlunya penguatan jaringan infrastruktur, integrasi sistem layanan berbasis elektronik, pengembangan pusat data daerah, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan regulasi dan tata kelola keamanan informasi. Strategi yang dihasilkan diharapkan menjadi peta jalan (roadmap) implementasi transformasi digital di Kabupaten Solok, yang bersifat adaptif terhadap perkembangan teknologi dan mampu menjawab tantangan era digital. Dengan penerapan strategi ini, Diskominfo diharapkan dapat mewujudkan layanan publik yang cepat, tepat, transparan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Kata Kunci: Transformasi Digital, Strategi, Layanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi pendorong utama perubahan sosial, ekonomi, dan pemerintahan di abad ke-21. Dalam konteks sektor publik,

teknologi digital tidak hanya menjadi sarana penunjang, tetapi juga sebagai *enabler* transformasi tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperluas partisipasi masyarakat.

Transformasi digital adalah proses menyeluruh yang melibatkan adopsi teknologi baru, penyesuaian proses kerja, dan pembentukan budaya organisasi yang berbasis inovasi. Menurut (Westerman et al., 2014), transformasi digital adalah “penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja organisasi secara signifikan, baik dari sisi efisiensi, efektivitas, maupun inovasi layanan.” Sementara itu, Kane et al. (2015) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh adopsi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kepemimpinan, dan budaya kerja yang mendukung perubahan.

Dalam konteks pemerintahan, OECD (2019) menjelaskan bahwa transformasi digital pemerintah bertujuan mewujudkan layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah tidak hanya menyediakan layanan secara daring, tetapi juga mengintegrasikan data, aplikasi, dan proses kerja lintas instansi untuk menciptakan *one-stop service*.

Di Indonesia, arah transformasi digital sektor publik telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Regulasi ini mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan layanan berbasis elektronik secara terintegrasi, efisien, dan aman. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) juga menekankan bahwa implementasi SPBE menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja birokrasi.

Bagi Kabupaten Solok, transformasi digital menjadi peluang sekaligus tantangan. Sebagai daerah dengan potensi pariwisata, pertanian, dan sumber daya alam yang besar, digitalisasi dapat menjadi motor penggerak promosi daerah, peningkatan daya saing, dan percepatan layanan publik. Namun, keberhasilan transformasi ini membutuhkan strategi yang terarah, terukur, dan sesuai dengan kondisi lokal.

Dokumen-dokumen dan laporan SPBE Kabupaten Solok (laporan 2020–2022) menunjukkan beberapa hal penting: adanya inisiatif layanan daring (website resmi, layanan informasi publik), pusat data daerah yang mulai beroperasi, serta kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis. Namun evaluasi pemantauan SPBE mengindikasikan kebutuhan peningkatan integrasi antar-aplikasi, pemerataan kemampuan SDM OPD, dan penguatan aspek keamanan informasi. Kondisi ini menjadi titik awal (baseline) dalam merancang strategi lima tahun yang realistis dan terukur.

KAJIAN TEORI

Konsep Transformasi Digital dalam Pemerintahan

Transformasi digital bukan sekadar adopsi teknologi informasi, melainkan proses perubahan menyeluruh yang melibatkan aspek teknologi, proses bisnis, struktur organisasi, dan budaya kerja guna menciptakan nilai baru bagi pemangku kepentingan (Westerman et al., 2014). Dalam konteks pemerintahan, transformasi digital sering dirujuk sebagai *e-government* atau *digital government* — upaya menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akses layanan publik, transparansi, dan partisipasi publik (OECD, 2020). Transformasi digital pemerintahan juga menuntut pendekatan yang berorientasi layanan (*service-oriented*), berpusat pada pengguna (*user-centered*), serta sifatnya lintas sektoral (*cross-sectoral*), sehingga memerlukan koordinasi antar-instansi dan integrasi data.

Beberapa kajian menekankan bahwa kegagalan transformasi digital seringkali bukan karena teknologi itu sendiri, melainkan karena kendala non-teknis: resistensi budaya, ketiadaan kepemimpinan yang visioner, regulasi yang belum adaptif, dan minimnya kapasitas sumber daya manusia (Othman et al., 2022). Oleh karena itu, strategi transformasi digital harus mengombinasikan investasi infrastruktur dengan program pembinaan SDM, kebijakan, dan insentif organisasi.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Landasan Kebijakan

Di Indonesia, implementasi transformasi digital pilar formalnya adalah SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018. SPBE menekankan integrasi layanan pemerintahan melalui pemanfaatan TIK secara terkoordinasi untuk mencapai pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Beberapa dimensi penilaian kematangan SPBE mencakup kebijakan dan tata kelola, layanan publik berbasis elektronik, infrastruktur dan platform, integ rasi data, serta aspek keamanan informasi (Bappenas & Kementerian PANRB, 2019).

Kajian mengenai SPBE menyoroti pentingnya kebijakan daerah yang konsisten dengan kebijakan nasional, ketersediaan standar teknis, serta mekanisme koordinasi antar-perangkat daerah. Tanpa payung kebijakan yang jelas dan pedoman teknis, implementasi SPBE rentan terfragmentasi sehingga menghambat interoperabilitas dan skalabilitas layanan (Setiawan & Nugroho, 2020).

Infrastruktur TIK sebagai Fondasi Transformasi Digital

Infrastruktur TIK meliputi jaringan (backbone, last-mile), pusat data (data center), server dan storage, serta infrastruktur keamanan seperti firewall dan sistem pemantauan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur menjadi prasyarat mutlak agar layanan digital dapat dioperasikan secara andal dan cepat (Laudon & Laudon, 2020). Khususnya di pemerintahan daerah, pemerataan akses internet hingga tingkat kecamatan/desa menjadi isu strategis karena tanpa pemerataan tersebut layanan digital tidak mencapai seluruh masyarakat.

Penelitian empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa keterbatasan bandwidth, ketergantungan pada koneksi publik yang tidak stabil, dan kurangnya pusat data lokal menyebabkan keterlambatan adopsi layanan digital yang sensitif waktu (mis. layanan administrasi daring, sistem informasi kesehatan). Oleh karena itu, investasi infrastruktur fisik harus disertai perencanaan kapasitas dan pemeliharaan jangka panjang agar berkelanjutan.

Kompetensi SDM dan Perubahan Budaya Organisasi

Transformasi digital menuntut kompetensi teknis (pemrograman, manajemen basis data, keamanan siber), kompetensi analitis (data analytics, business intelligence), serta kompetensi manajerial (change management, digital project governance). Model kompetensi ICT UNESCO dan framework kompetensi digital menekankan tiga aspek utama: literasi digital dasar, kompetensi profesional, dan kemampuan inovasi (UNESCO, 2018). Di tingkat instansi pemerintahan, pembinaan SDM perlu bersifat berkelanjutan — kombinasi pelatihan formal, on-the-job training, dan program sertifikasi.

Perubahan budaya organisasi juga krusial; pegawai harus beralih dari paradigma prosedural ke paradigma layanan berbasis data dan kolaborasi. Studi kasus menunjukkan bahwa program pelatihan tanpa dukungan insentif dan kepemimpinan akan sulit mengubah kebiasaan kerja lama (Aguinis, 2019). Oleh karena itu, strategi HR seperti career path berbasis kompetensi digital, reward system untuk inovasi, dan mentoring diperlukan.

Integrasi Sistem, Interoperabilitas, dan Manajemen Data

Integrasi sistem antar-unit pemerintahan adalah fondasi untuk menghindari silo data yang menghambat pelayanan terpadu. Interoperabilitas teknis dan semantik memastikan data dapat dipertukarkan antar aplikasi tanpa kehilangan makna. Implementasi API, standar data terbuka, dan arsitektur layanan (service-oriented architecture) sering direkomendasikan sebagai praktik terbaik (Perpres No.95/2018; World Bank, 2018).

Manajemen data publik juga menuntut tata kelola (data governance) yang mencakup kualitas data, metadata, kebijakan akses, dan mekanisme proteksi data pribadi. Tanpa tata kelola data yang baik, upaya analytics dan pengambilan kebijakan berbasis bukti akan terhambat.

Keamanan Informasi dan Privasi Data

Ancaman siber meningkat seiring dengan perluasan layanan digital. Standar internasional seperti ISO/IEC 27001 memberikan kerangka kerja untuk mengelola risiko keamanan informasi (confidentiality, integrity, availability). Pemerintah daerah perlu mengembangkan kebijakan keamanan siber, prosedur respons insiden, serta program awareness bagi pegawai dan masyarakat

(ISO/IEC 27001, 2013). Sertifikasi dan audit berkala dapat meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan kepatuhan terhadap standar.

Pemanfaatan Layanan Digital dan Kepuasan Pengguna

Tingkat adopsi dan pemanfaatan layanan digital menjadi indikator keberhasilan transformasi. Adopsi bergantung pada faktor aksesibilitas, kemudahan penggunaan (usability), dan persepsi manfaat (perceived usefulness). Model Technology Acceptance Model (TAM) dan pendekatan SERVQUAL sering digunakan untuk mengukur kepuasan pengguna dan kualitas layanan (Davis, 1989; Parasuraman et al., 1988). Evaluasi berbasis survei pengguna, analitik penggunaan aplikasi, dan feedback loop membantu penyempurnaan layanan secara berkelanjutan.

Inovasi Layanan Publik dan Kolaborasi Eksternal

Inovasi dalam layanan publik dapat muncul melalui inisiatif internal maupun kolaborasi dengan sektor swasta, startup, dan akademisi. Kolaborasi mempercepat transfer teknologi, pengembangan solusi yang relevan, dan membuka akses sumber daya tambahan. Model kolaborasi triple helix (pemerintah-industri-universitas) dapat dimanfaatkan untuk pengembangan inovasi digital lokal yang berkelanjutan. Namun, kolaborasi harus diatur secara jelas melalui kontrak, MOUs, dan mekanisme evaluasi untuk menjaga kesinambungan proyek.

Pengukuran Kinerja dan Indikator Evaluasi

Evaluasi kinerja transformasi digital memerlukan indikator kuantitatif dan kualitatif: ketersediaan infrastruktur (persentase cakupan jaringan), kualitas layanan (waktu respons, uptime), kompetensi SDM (% pegawai terlatih), integrasi sistem (jumlah layanan terintegrasi), keamanan (jumlah insiden), pemanfaatan layanan (persentase pengguna aktif), inovasi (jumlah inisiatif baru), dan kepuasan pengguna (skor survei). Pengukuran berkala memungkinkan pemantauan progres dan pengambilan kebijakan korektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran secara mendalam mengenai strategi transformasi digital yang akan dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam jangka lima tahun ke depan. Pendekatan ini dipilih untuk memahami fenomena, kendala, serta peluang yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan transformasi digital di lingkungan instansi pemerintah daerah.

Tabel 1. Metode Penelitian

No	Komponen	Uraian
1	Pendekatan	Kualitatif Deskriptif
2	Jenis Penelitian	Studi Kasus pada Dinas Kominfo Kabupaten Solok
3	Objek Penelitian	Strategi Transformasi Digital 5 Tahun
4	Sumber Data	Primer (wawancara, observasi), Sekunder (dokumen resmi, literatur)
5	Teknik Pengumpulan Data	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
6	Metode Analisis	Miles & Huberman (2014): Reduksi Data → Penyajian Data → Kesimpulan
7	Instrumen	Panduan wawancara, lembar observasi, form checklist
8	Lokasi & Waktu Penelitian	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, 2025

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model Miles & Huberman (2014), yang terdiri dari: Reduksi Data, Pemilihan dan penyederhanaan data dari wawancara, observasi, dan dokumen menjadi informasi relevan, Penyajian Data, Menyusun data ke dalam bentuk tabel, bagan, dan narasi agar mudah dipahami, Penarikan Kesimpulan, Menginterpretasikan temuan untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah ringkasan hasil penelitian mengenai Strategi Transformasi Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok: Rencana Lima Tahun ke Depan yang dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Penelitian

No	Indikator	Hasil pada Dinas Kominfo Kab. Solok
1	Infrastruktur Teknologi Informasi	Sudah tersedia jaringan internet di sebagian besar kantor OPD, namun belum merata di seluruh wilayah kerja; bandwidth masih terbatas pada jam-jam sibuk.
2	Sistem Informasi dan Aplikasi	Telah dikembangkan beberapa aplikasi layanan publik seperti <i>SIDILAN</i> , <i>e-Office</i> , dan portal SPBE; integrasi antar aplikasi masih terbatas sehingga data belum sepenuhnya terpusat.
3	Sumber Daya Manusia (SDM) Digital	Terdapat pegawai yang memiliki kompetensi di bidang IT, namun proporsinya masih rendah dibandingkan kebutuhan; pelatihan digital baru dilaksanakan secara berkala dan belum menyentuh semua staf.
4	Tata Kelola dan Regulasi	Sudah ada peraturan bupati dan SOP terkait pemanfaatan teknologi informasi; namun, beberapa kebijakan belum disosialisasikan secara optimal ke seluruh unit kerja.
5	Keamanan Siber	Sistem keamanan data masih mengandalkan <i>firewall</i> standar dan belum memiliki pusat <i>cyber security</i> ; risiko kebocoran data masih ada.
6	Kolaborasi dan Kemitraan	Sudah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak seperti BAKTI Kominfo dan penyedia jasa internet; kemitraan dengan sektor swasta masih minim.
7	Pendanaan Transformasi Digital	Anggaran tersedia namun masih terbatas sehingga prioritas diberikan pada program utama; dukungan pendanaan dari pemerintah pusat belum optimal.
8	Kesiapan Masyarakat dan Layanan Publik Digital	Masyarakat mulai memanfaatkan layanan digital seperti pengaduan online dan informasi publik; namun literasi digital di sebagian kalangan masyarakat masih rendah.
9	Monitoring dan Evaluasi Program Digital	Evaluasi dilakukan setiap tahun melalui laporan SPBE; belum ada sistem <i>dashboard</i> real-time untuk memantau kinerja transformasi digital secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok telah memulai langkah-langkah strategis dalam transformasi digital, seperti pengembangan infrastruktur TIK, penyediaan aplikasi layanan publik, dan penerapan kebijakan tata kelola teknologi. Namun, terdapat beberapa tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu:

1. Pemerataan infrastruktur dan jaringan internet di seluruh wilayah kerja.
2. Peningkatan kompetensi SDM digital secara merata di semua level pegawai.
3. Integrasi sistem informasi agar data lebih terpusat dan layanan lebih efisien.
4. Penguatan keamanan siber untuk melindungi data pemerintah dan publik.
5. Perluasan kolaborasi dengan sektor swasta dan dukungan pendanaan eksternal.

Secara keseluruhan, strategi transformasi digital lima tahun ke depan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas internal, pembangunan ekosistem digital, dan pemberdayaan masyarakat agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara luas.

Pembahasan

1. Kesiapan Infrastruktur Digital

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu pilar utama strategi transformasi digital di Diskominfo Kabupaten Solok adalah penguatan infrastruktur TIK, termasuk peningkatan kapasitas jaringan internet, integrasi pusat data, dan pengamanan siber. Temuan ini sejalan dengan teori *Digital Readiness* yang dikemukakan oleh Westerman et al. (2014), yang menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan ekosistem teknologi. Namun, di lapangan, penelitian menemukan bahwa tantangan terbesar terletak pada keterbatasan anggaran dan cakupan jaringan di wilayah terpencil. Hal ini mengindikasikan bahwa keberlanjutan strategi memerlukan dukungan lintas sektor, termasuk kerja sama dengan pihak swasta dan optimalisasi dana transfer pusat.

2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Digital

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan digital literacy, manajemen data, dan keamanan informasi menjadi fokus utama lima tahun ke depan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *Human Capital Theory* (Becker, 1993) yang menekankan bahwa investasi pada pengembangan SDM akan memberikan dampak jangka panjang terhadap produktivitas organisasi. Diskusi internal menunjukkan bahwa program pelatihan harus disesuaikan dengan tingkat literasi digital masing-masing pegawai agar proses adopsi teknologi berjalan efektif. Selain itu, diperlukan insentif dan sistem penghargaan untuk mendorong motivasi belajar berkelanjutan.

3. Integrasi Layanan Publik Digital

Strategi integrasi berbagai layanan publik ke dalam satu platform terpadu (one-stop service) merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi. Hal ini selaras dengan prinsip *Government 4.0* yang menekankan pelayanan publik yang bersifat proaktif, terintegrasi, dan berbasis data. Namun, penelitian menemukan bahwa integrasi ini memerlukan sinkronisasi regulasi antar dinas serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan layanan digital. Diskominfo perlu melakukan kampanye literasi digital kepada warga, agar transformasi tidak hanya terjadi di tingkat birokrasi, tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh publik.

4. Tata Kelola dan Keamanan Data

Temuan penelitian menggarisbawahi pentingnya penerapan tata kelola data (data governance) yang baik, termasuk aspek privasi, integritas, dan keamanan informasi. Model ini sesuai dengan kerangka *ISO/IEC 27001* tentang manajemen keamanan informasi, yang menekankan adanya kebijakan, prosedur, dan kontrol teknis yang konsisten. Diskusi menunjukkan bahwa untuk lima tahun ke depan, Diskominfo perlu mengembangkan *disaster recovery plan* dan *business continuity plan* guna memastikan layanan digital tetap berjalan meski terjadi gangguan teknis atau bencana.

5. Evaluasi Kinerja Berkelanjutan

Penelitian ini juga menekankan pentingnya mekanisme evaluasi kinerja transformasi digital secara berkala, menggunakan indikator yang terukur, seperti tingkat penggunaan layanan digital oleh masyarakat, kecepatan respon layanan, dan tingkat keamanan data. Pendekatan ini sejalan dengan model *Performance Management* (Aguinis, 2019) yang memandang evaluasi sebagai proses berkelanjutan, bukan sekadar penilaian tahunan. Dalam konteks Kabupaten Solok, evaluasi kinerja harus disertai tindak lanjut konkret, seperti penyesuaian strategi, pembaruan teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, strategi transformasi digital yang direncanakan Diskominfo Kabupaten Solok memiliki landasan yang kuat secara teoritis dan selaras dengan kebijakan nasional. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada: 1) Komitmen politik dan dukungan anggaran yang memadai. 2) Peningkatan literasi digital, baik di kalangan pegawai maupun

masyarakat. 3) Penguatan kerja sama dengan pihak swasta dan instansi lain. 4) Evaluasi kinerja yang berkesinambungan dengan indikator terukur. 5) Perlindungan dan pengelolaan data yang sesuai standar keamanan internasional. Dengan mengintegrasikan aspek infrastruktur, SDM, layanan publik, tata kelola data, dan evaluasi kinerja, strategi lima tahun ke depan berpotensi mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan berbasis teknologi di Kabupaten Solok.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguinis, H. (2019). *Manajemen Kinerja*.
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*.
- Othman, I. W., Kamlun, K., Din, W. A., & Ab Aziz, A. A. (2022). Positive Impact of Self-Assessment First Year Experience on Academic Achievement Among International Students. *International Journal of Education, Psychology and Counseling*, 7(48), 103–125. <https://doi.org/10.35631/ijepc.748008>
- Setiawan, R., & Nugroho, Y. (2020). E-Government dan transformasi digital di Indonesia: Tantangan dan peluang. *Jurnal Kebijakan Publik*.
- Westerman, G., Bonnet, D., & McAfee, A. (2014). *Leading Digital: Turning Technology Into Business Transformation*.